

Nama: Tiara Katrina

NPM: 2313031058

Kelas: C

Mata Kuliah: Ekonomi Pendidikan

Dosen Pengampu: Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd | Meyta Pritandhari, S.Pd., M.Pd | Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd

CASE STUDY (Studi Kasus)

Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya

A. Analisis Struktur Pengeluaran

- **Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?**

Jawaban: Struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya belum efisien secara fungsional dan alokatif, meskipun secara kuantitatif telah memenuhi mandat konstitusi (22% dari APBD). Masalah utama bukan pada jumlah anggaran, melainkan pada ketidaktepatan alokasi anggaran (*misallocation of funds*) terhadap output kuantitatif. Dominasi belanja pegawai yang mencapai 68% untuk gaji dan tunjangan mencerminkan tingginya pengeluaran rutin, tetapi kontribusinya gagal mendongkrak capaian literasi dan numerasi siswa yang masih di bawah rata-rata nasional. Anggaran yang besar ini habis akibat inefisiensi penataan tata kelola guru, seperti fenomena kelebihan guru di perkotaan dan kekosongan di daerah terpencil.

- **Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?**

Jawaban: Reformasi anggaran perlu dilakukan melalui strategi *rebalancing expenditure* (penataan ulang komposisi belanja) dengan menggeser belanja rutin ke belanja strategis berbasis hasil (*outcome*). Sektor yang perlu direalokasi adalah:

1. **Belanja Pegawai (Turun dari 68% ke 55%):** Penurunan porsi ini dilakukan tanpa memotong pendapatan guru, melainkan dengan moratorium rekrutmen di wilayah perkotaan yang surplus, menerapkan sistem redistribusi guru berbasis kebutuhan (*needs-based allocation*), serta menerapkan upah/insentif diferensial khusus untuk penempatan daerah terpencil.
2. **Belanja Infrastruktur (Naik dari 12% ke 20%):** Tambahan anggaran ini dialokasikan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur digital (*digital equity*) di sekolah-sekolah pedesaan agar akses pembelajaran menjadi setara.

3. **Program Bantuan Siswa (Naik dari 8% ke 15%):** Diperluas menggunakan pendekatan *targeted subsidy* melalui seleksi kondisi ekonomi riil (*means-tested*) guna menekan angka putus sekolah di daerah pedesaan.
4. **Belanja Administrasi (Turun dari 12% ke 10%):** Dilakukan efisiensi melalui digitalisasi birokrasi dan penguatan *Education Management Information System* (EMIS) sebagai pusat data tunggal.

B. Analisis Sumber Pembiayaan

- **Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?**

Jawaban: Ya, pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya sangat bergantung pada APBD, yang berisiko memicu kerapuhan fiskal jika pendapatan daerah berfluktuasi. Ketergantungan struktural ini menjebak pemda, di mana 68% dana terserap untuk belanja pegawai normatif, sehingga menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit bagi pembangunan infrastruktur (12%) dan bantuan siswa (8%). Ketergantungan penuh pada APBD membatasi akselerasi mutu pendidikan di saat rapor literasi-numerasi daerah sedang dalam kondisi darurat.

- **Perluakah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat.**

Jawaban: Keterlibatan sektor swasta bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan instrumen strategis untuk menutup *funding gap*. Model pembiayaan alternatif yang tepat diterapkan adalah:

1. *Public-Private Partnership* (PPP / KPBU): Pemda bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi (provider internet/perusahaan gawai) untuk membangun infrastruktur digital sekolah di daerah terpencil. Sektor swasta membangun dan memelihara jaringan, sedangkan pemerintah membayar secara berkala melalui skema sewa jangka panjang atau kompensasi insentif pajak daerah.
2. *Strategic CSR* (*Corporate Social Responsibility*): Mengintegrasikan program CSR perusahaan-perusahaan di Nusantara Raya agar tidak bersifat sporadis. Dana CSR dipusatkan untuk mendanai beasiswa siswa miskin atau penyediaan perangkat laboratorium digital terpadu.
3. *Education Bonds* (Obligasi Pendidikan Daerah): Pemerintah provinsi dapat menerbitkan surat utang daerah jangka menengah-panjang yang khusus diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan fisik sekolah-sekolah di wilayah pedesaan.

C. Perbandingan dengan Negara OECD

- **Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?**

Jawaban: Terdapat tiga elemen utama negara OECD yang dapat diadopsi secara bertahap:

1. Sistem Pembiayaan Berbasis Kebutuhan Siswa (*Needs-Based Funding*): Anggaran dialokasikan secara asimetris, di mana indeks pendanaan per siswa sekolah di pedesaan atau sekolah dengan mayoritas siswa prasejahtera bernilai lebih tinggi dibanding sekolah perkotaan.
2. Performance-Based Budgeting (PBB): Pengalokasian dana insentif tambahan bagi sekolah didasarkan pada tingkat kemajuan nilai tambah (*value-added*) hasil belajar siswa, bukan berdasarkan status atau ukuran sekolah semata.
3. *Continuous Professional Development (CPD) & Performance Pay*: Menghubungkan tunjangan kinerja tambahan guru dengan partisipasi aktif dalam program kompetensi berkelanjutan, mentoring guru sejawat, serta hasil evaluasi belajar siswa.

- **Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?**

Jawaban: Tantangan nyata yang akan dihadapi dalam konteks lokal meliputi:

- Keterbatasan Infrastruktur TI: Belum meratanya jaringan internet merintangi pelaksanaan evaluasi berbasis data secara berkala.
- Keterbatasan SDM Pengelola Data: Rendahnya kompetensi analisis data di tingkat dinas dan sekolah untuk mengoperasikan sistem *evidence-based policy*.
- Budaya Birokrasi yang Kaku: Manajemen pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
- Resistensi Pengajar: Potensi penolakan dari serikat guru terhadap skema *performance-based pay* karena dianggap mengancam kenyamanan pendapatan rutin.
- Fragmentasi Otonomi Daerah: Ketidaksinkronan regulasi anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akibat tumpang tindih kewenangan wilayah.

D. Rancangan Reformasi

Proposal singkat cetak biru (*blueprint*) reformasi pembiayaan selama 5 tahun disusun sebagai berikut:

- **Tahun 1 - Tahun 2: Perubahan Struktur Belanja & Penataan Guru**
 - Fokus pada *rebalancing* struktur anggaran: Menurunkan porsi belanja pegawai menjadi 55% secara bertahap melalui moratorium rekrutmen di kota.
 - Melaksanakan program penataan dan redistribusi guru besar-besaran dari kota ke desa melalui mandat dinas yang disertai dengan pemberian insentif diferensial masif (tunjangan khusus 3T, percepatan naik pangkat, dan penyediaan rumah dinas).
 - Pembersihan data pendidikan dan integrasi penuh platform data EMIS provinsi untuk memetakan kebutuhan riil sarana dan guru.
- **Tahun 3 - Tahun 4: Strategi Peningkatan Kualitas Guru & Digitalisasi**
 - Mengalihkan surplus anggaran belanja pegawai ke anggaran infrastruktur digital (naik menjadi 20%) dan bantuan siswa (naik menjadi 15%).
 - Meluncurkan program *Continuous Professional Development* berbasis klaster sekolah, di mana guru-guru berprestasi dari perkotaan diwajibkan menjadi mentor klinis bagi guru-guru di pedesaan melalui program Guru Penggerak Daerah.
 - Eksekusi kerja sama PPP (KPBU) dengan sektor swasta untuk menuntaskan target 100% sekolah di daerah terpencil terkoneksi internet (*digital equity*).
- **Tahun 5: Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Transisi Performance-Based Budgeting**
 - Melakukan audit kinerja independen secara menyeluruh terhadap dampak pemanfaatan realokasi anggaran selama 5 tahun.
 - Menerapkan penilaian kinerja berbasis data melalui ujian standarisasi literasi dan numerasi daerah untuk mengukur *value-added* (nilai tambah kemajuan belajar) tiap sekolah.
 - Meluncurkan fase pertama skema *performance-based budgeting*, di mana sekolah yang berhasil meningkatkan skor literasi-numerasi siswanya secara signifikan (terutama di pedesaan) akan menerima dana

apresiasi tambahan berupa dana BOS Daerah Kinerja di tahun anggaran berikutnya.